

**TINJAUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
MERAUKE TERHADAP PENJUALAN MINUMAN KERAS**

SKRIPSI

Oleh :

ANNICA WEJERI

2140050604



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**TINJAUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
MERAUKE TERHADAP PENJUALAN MINUMAN KERAS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

ANNICA WEJERI

2140050604



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

VISI DAN MISI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi :

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, Mandiri dan inovatif di Kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi :

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga, gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annica Wejeri
NIM : 2140050604
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis akhir yang berjudul: **“Tinjauan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Marauke Terhadap Penjualan Minuman Keras”**

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 4 Februari 2025
Yang membuat pernyataan,



(Annica Wejeri)
NIM. 2140050604



PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh

Nama : Annica Wejeri
NIM : 2140050604
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : **Tinjauan Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Merauke Terhadap
Penjualan Minuman Keras**

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta 4 Februari 2025

Menyetujui:

Pembimbing I,

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)
NIDN. 0326116401

Pembimbing II,

(Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.)
NIDN. 0325028101

Ketua Program Studi Hukum,

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
NIDN. 0327046303

Dekan,

(Dr. Hendri Jayadi P., S.H., M.H.)
NIDN/0302117904






PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 4 Februari 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Nama : Annica Wejeri
NIM : 2140050604
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : **Tinjauan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Merauke Terhadap Penjualan Minuman Keras**

oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H	Ketua	
2. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H	Anggota	
3. Dr. Pdt. Marudut Silitonga, S.Th., S.H., M.H	Anggota	

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE TERHADAP PENJUALAN MINUMAN KERAS

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

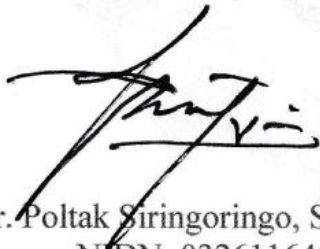
Nama : Annica Wejeri
NIM : 2140050604
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Pidana

telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 4 Februari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)
NIDN. 0326116401



(Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.)
NIDN. 171443/0325028101

Anggota Tim Penguji



Dr. Pdt. Marudut Silitonga, S.Th., S.H., M.H.



Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annica Wejeri
NIM : 2140050604
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : **TINJAUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MARAUKE
TERHADAP PENJUALAN MINUMAN KERAS**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut. Maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 4 Februari 2025

Yang menyatakan



(Annica Wejeri)
NIM. 2140050604

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Merauke Terhadap Penjualan Minuman Keras”**.

Penulis Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar strata satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis yang sudah memberikan doanya serta dukungan secara moril dan materil. Sehingga dapat terselesaikan dengan benar.
2. Bapak Rektor Prof. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H.,M.B.A., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
3. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandingan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H, selaku Wakil Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Radisman Saragih, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing I yang telah membimbing sampai akhir dengan penuh kesabaran sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
8. Bapak Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membimbing sampai akhir dengan penuh kesabaran sehingga penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar.
9. Para dosen, terimakasih kepada Bapak/Ibu yang sudah memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Manajemen Pajak Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

10. Julianti Souisa, Chenesya Zefanya dan teman-teman lainnya di program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga selalu kompak dan solid sampai kapanpun.
11. Teman-teman dari luar prodi juga, terimakasih atas semua dukungan, semangat, motivasi-motivasi yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Diakhir kata, penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak dan mohon masukan dan saran atas skripsi yang penulis sajikan, untuk perbaikan penulis kedepannya.

Jakarta, 22 Januari 2026

Annice Wejeri



DAFTAR ISI

Halaman

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Negara Hukum	16
B. Teori Tujuan Hukum	20
C. Teori Sistem Hukum	29
BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DALAM TATA KELOLA PENJUALAN MINUMAN KERAS	40
A. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Minuman Keras	42
1. Perencanaan	48
2. Pengorganisasian	48
3. Pelaksanaan	48
4. Pengendalian	49

B. Tata Kelola Minuman Keras	51
C. Pengawasan Penjualan Minuman Keras oleh Pemerintah Kabupaten- Merauke	55
1. Sasaran	56
2. Kualitas Pelayanan	57
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEREDARAN MINUMAN KERAS	66
A. Dampak Negative Peredaran Minuman Keras	66
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peredaran Minuman Keras	70
C. Pendekatan Ultimatum Remedium Melalui Restorative Justice Dalam Pelanggaran Pengedaran Minuman Keras.....	83
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94

ABSTRAK

- A. Nama : Annica Wejeri
B. NIM : 2140050604
C. Bagian : Hukum Pidana
D. Judul : Tinjauan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Merauke Terhadap Penjualan Minuman Keras
E. Halaman : i-xii, 101 halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Minuman Keras, Penegakan Hukum, Kabupaten Merauke
G. Ringkasan Isi :

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Merauke dalam tata kelola penjualan minuman keras serta meninjau efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Fokus penelitian mencakup kesesuaian regulasi dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta laporan resmi terkait. Teori yang digunakan mencakup teori negara hukum, teori tujuan hukum, dan teori sistem hukum untuk menganalisis implementasi kebijakan serta efektivitas penegakan hukum di Kabupaten Merauke.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola penjualan minuman keras telah sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasi akibat faktor sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kesadaran hukum, edukasi masyarakat, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum. Dalam penegakan hukum, prinsip kepastian hukum yang adil serta pendekatan *ultimum remedium* dan keadilan restoratif harus diterapkan guna mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan masyarakat.

- H. Daftar Acuan : 79 buku + 11 peraturan perundang-undangan
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H
Dosen Pembimbing II : Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H

Jakarta, 22 Januari 2025

Annica Wejeri

ABSTRACT

- A. Name : Annica Wejeri
B. NIM : 2140050604
C. Part : Criminal Law
D. Title : Review of Merauke District Government Policy on the Sale of Alcoholic Beverages
E. Page : i-xii, 101 pages + Bibliography + Attachment
F. Keywords : Government Policy, Alcoholic Beverages, Law Enforcement, Merauke Regency
G. Summary :

This study aims to analyze the policies of the Merauke Regency Government in managing the sale of alcoholic beverages and to examine the effectiveness of law enforcement against violations. The focus of this research includes the compliance of regulations with applicable laws and legal principles. Additionally, this study seeks to identify obstacles and provide recommendations to enhance the effectiveness of these policies.

The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The data utilized are secondary data obtained from literature studies, including statutory regulations, scientific journals, and official reports. The theories used include the rule of law theory, the purpose of law theory, and the legal system theory to analyze policy implementation and the effectiveness of law enforcement in Merauke Regency.

The results show that the management of alcoholic beverage sales complies with legal provisions but still faces implementation challenges due to social and cultural factors. Therefore, strengthening legal awareness, educating the public, and improving coordination between the government and law enforcement agencies are necessary. In law enforcement, the principle of fair legal certainty, along with the ultimum remedium approach and restorative justice, must be applied to achieve a balance between legal certainty, benefits, and public protection.

- H. Reference list : 79 books + 11 regulation
I. Supervisor I : Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H
Supervisor II : Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H

Jakarta, January 22, 2025.

Annica Wejeri